



**RENCANA KERJA AWAL
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2025**



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas tuntunan dan penyertaanNya, maka Penyusunan Rencana Kerja Awal Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik. Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan tahunan Sekretariat DPRD, yang memuat program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sebagai bagian dari rangkaian sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja PD juga sangat penting peranannya dalam menentukan keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah serta pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Dengan tersusunnya Renja Awal 2025 ini, diharapkan menjadi bahan acuan dalam perumusan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 guna pencapaian target-target kinerja sasaran pada Sekretariat DPRD pada khususnya dan Kabupaten Rote Ndao pada umumnya. Walaupun masih ditemui berbagai masalah dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Hal tersebut akibat sumber daya manusia aparatur yang masih terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya.

Dalam menyusun Rencana Kerja Awal Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 ini tentunya masih belum sempurna oleh karena itu apabila ada saran-saran yang membangun demi kesempurnaan Rencana Kerja Awal ini sangat diharapkan. Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rencana Kerja Awal ini.

Ba'a, 21 Maret 2025
Sekretaris DPRD Kab. Rote Ndao,



Benyamin Koamesah, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19670828 199903 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	16
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	23
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	 24
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	24
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	24
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	 27
 BAB V PENUTUP	 33

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Evaluasi Renja Sekretariat DPRD Triwulan IV Tahun 2023.....	10
Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao.....	15
Tabel 3. Review Rancangan Awal RKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.....	18
Tabel 4. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao Tahun 2025	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan utama pembangunan nasional adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, Untuk mewujudkan tujuan nasional ini pemerintah pusat berupaya dengan berbagai instrument kebijakan yang didistribusikan dalam berbagai cara diantaranya pembentukan peraturan perundang - undangan, penyusunan perencanaan pembangunan nasional, tata kelola pemerintahan serta kebijakan lainnya. Perumusan kebijakan ini sebagian besar telah dilimpahkan ke daerah melalui semangat desentralisasi, dekonsentrasi yang terangkum dalam bingkai otonomi daerah.

Pemberian kewenangan kepada daerah ini diharapkan mampu memberikan percepatan pencapaian tujuan nasional tersebut di atas. Untuk itu pelaksanaan Tata Pemerintahan yang baik **(Good Governance)** merupakan syarat mutlak untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan dengan upaya meningkatkan mutu dan tatanan manajemen pemerintahan sehingga dapat terwujudnya pelayanan publik **(Public Service)** yang memuaskan, tercapainya pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel yang pada akhirnya berdampak pada kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam manajemen pemerintahan daerah dikenal dengan sistem birokrasi yang terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Sistem manajemen pemerintahan daerah penerapannya melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKPD) yang tersusun dalam siklus yang tidak terputus dan terintegrasi yang dimulai dengan disusunnya Rencana Pembangunan untuk jangka 5 (lima) tahunan atau Lazim disebut RPJMD dan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk masa 1(satu) tahun.

Selanjutnya oleh Perangkat Daerah yang merupakan implementator teknis dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKPD) penerapannya melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang tersusun dalam siklus yang tidak terputus dan terintegrasi yang dimulai dengan disusunnya Rencana strategis untuk jangka 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran teknis operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD). Dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Lima Tahunan ini dijabarkan kembali dalam Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Awal Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

- tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024;
 17. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;

18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 adalah :

1. Menjadi Tolok Ukur dan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah untuk masa satu tahun.
2. Memberikan gambaran teknis tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao.
3. Sebagai alat pencetus semangat kerja serta memberikan gambaran operasional terkait pekerjaan yang dilaksanakan oleh personalia yang ada di dalam Perangkat Daerah.
4. Sebagai alat untuk percepatan pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar penyusunan laporan kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan bagian dari Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKPD) dalam hal ini akuntabilitas dari tugas-tugas kepada Bupati dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam hal ini untuk mengukur akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao adalah :

1. Menggambarkan sejauh mana tugas, kewenangan dan kinerja Sekretariat DPRD.
2. Dapat memberikan sumbangsi dalam penataan administrasi dalam menunjang kegiatan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan.
3. Sebagai bahan informasi staf terkait pelaksanaan tugas dan fungsi fasilitasi DPRD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Adapun kerangka atau sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam Penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realiasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indicator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indicator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan uraian
Mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

4.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain:
- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu)
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun berjalan dan Prakiraan Maju Tahun selanjutnya.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan masing-masing:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pagu Anggaran sebesar Rp.5.626.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.626.000,- atau 100%.
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pagu anggaran sebesar Rp.4.135.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.135.300,- atau 100%.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan masing-masing:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pagu anggaran sebesar Rp.1.524.990.476,- realisasi sebesar Rp.1.477.312.446,- atau 96,87%.
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
Pagu anggaran sebesar Rp. 105.195.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 105.150.000,- atau 99,96%.
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Pagu anggaran sebesar Rp. 14.625.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.625.000,- atau 100%.

- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan masing-masing :
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pagu anggaran sebesar Rp. 10.145.975,- realisasi sebesar Rp.10.145.975,- atau 100%.
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pagu anggaran sebesar Rp. 103.635.940,- realisasi sebesar Rp. 103.634.000,- atau 99,99%.
 - 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pagu anggaran sebesar Rp. 14.827.380,- realisasi sebesar Rp. 14.800.000,- atau 99,82%.
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu anggaran sebesar Rp. 16.500.000,- realisasi sebesar Rp. 15.750.000,- atau 95,45%.
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pagu anggaran sebesar Rp.63.436.000,- realisasi sebesar Rp. 62.908.000,- atau 99,17%.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub Kegiatan masing-masing :
- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
Pagu anggaran sebesar Rp. 17.328.000,- realisasi sebesar Rp. 17.328.000,- atau 100%.
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik
Pagu anggaran sebesar Rp. 199.480.000,- realisasi sebesar Rp.176.133.200,- atau 88,30%.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan masing-masing:
- 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan/dinas atau kendaraan dinas jabatan
Pagu anggaran sebesar Rp.495.181.000,- realisasi sebesar Rp. 493.038.000,- atau 99,57%.
 - 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
Pagu anggaran sebesar Rp. 12.694.500,- realisasi sebesar Rp. 12.650.000,- atau 99,65%.

- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
Pagu anggaran sebesar Rp. 10.815.635,- realisasi sebesar Rp. 10.700.000,- atau 98,93%.
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya
Pagu anggaran sebesar Rp. 6.863.130,- realisasi sebesar Rp. 6.776.000,- atau 98,73%.
 - g. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dengan sub kegiatan masing-masing :
 - 1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
Pagu anggaran sebesar Rp. 10.310.856.145,- realisasi sebesar Rp. 10.230.311.103,- atau 99,22%.
 - 2) Penyediaan Pakaian dan atribut DPRD
Pagu anggaran sebesar Rp. 12.300.000,- realisasi sebesar Rp. 12.000.000,- atau 97,56%.
 - 3) Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD
Pagu anggaran sebesar Rp. 355.974.000,- realisasi sebesar Rp. 348.006.000,- atau 97,76%.
 - h. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD dengan sub kegiatan masing-masing:
 - 1) Fasilitasi Fraksi DPRD
Pagu anggaran sebesar Rp. 91.163.190,- realisasi sebesar Rp. 91.068.000,- atau 99,90%.
 - 2) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
Pagu anggaran sebesar Rp. 81.800.000,- realisasi sebesar Rp. 81.800.000,- atau 100%.
 - 3) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
Pagu anggaran sebesar Rp. 1.680.000.000,- realisasi sebesar Rp. 1.680.000.000,- atau 100%.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- a. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan sub kegiatan masing-masing:
 - 1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Pagu anggaran sebesar Rp. 2.364.516.000,- realisasi sebesar Rp. 2.363.870.000,- atau 99,97%.

- 2) Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
Pagu anggaran sebesar Rp. 17.000.000,- realisasi sebesar Rp. 17.000.000,- atau 100% realisasi tidak sesuai dengan yang direncanakan karena target 1 Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tidak berhasil ditetapkan.
- b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan sub kegiatan masing-masing:
 - 1) Pembahasan KUA dan PPAS
Pagu anggaran sebesar Rp.14.985.000,- realisasi sebesar Rp.14.985.000,- atau 100 %.
 - 2) Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS
Pagu anggaran sebesar Rp. 14.985.000,- realisasi sebesar Rp. 14.985.000,- atau 100%.
 - 3) Pembahasan APBD
Pagu anggaran sebesar Rp. 91.265.000,- realisasi sebesar Rp. 91.190.000,- atau 99,92%.
 - 4) Pembahasan APBD Perubahan
Pagu anggaran sebesar Rp. 54.000.000,- realisasi sebesar Rp. 53.885.000,- atau 99,79%.
 - 5) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
Pagu anggaran sebesar Rp. 91.265.000,- realisasi sebesar Rp. 91.265.000,- atau 100%.
- c. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan sub kegiatan :
 - 1)Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Pagu anggaran sebesar Rp. 50.725.300,- realisasi sebesar Rp. 50.644.300,- atau 99,84%.
- d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan sub kegiatan masing-masing :
 - 1) Pendalaman Tugas DPRD
Pagu anggaran sebesar Rp. 487.746.000,- realisasi sebesar Rp. 487.745.055,- atau 99,99%.
 2. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
Pagu anggaran sebesar Rp. 210.000.000,- realisasi sebesar Rp. 210.000.000,- atau 100%.

e. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan sub kegiatan masing-masing :

1) Kunjungan Kerja Dalam Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp. 193.200.000,- realisasi sebesar Rp192.820.000,- atau 99,80%.

2) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pagu anggaran sebesar Rp. 11.790.000,- realisasi sebesar Rp. 11.778.000,- atau 99,90%.

3) Pelaksanaan Reses

Pagu anggaran sebesar Rp. 4.212.720.000,- realisasi sebesar Rp. 4.212.264.000,- atau 99,99%.

f. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD dengan sub kegiatan :

1) Koordinasi dan Konsultasi Tugas DPRD

Pagu anggaran sebesar Rp. 774.784.000,- realisasi sebesar Rp. 772.859.800,- atau 99,75%.

Mencermati capaian kinerja kegiatan pada Perangkat Daerah Sekretariat DPRD tahun anggaran 2023 tersebut di atas, maka secara rata-rata capaian Sekretariat DPRD dalam pencapaian rencana kerja kondisi triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar 100% dan realisasi keuangan 99,29%.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD
dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD s/d Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023			TARGET PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
						TARGET RENJA PD TAHUN 2023	REALISASI RENJA PD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	%	100	100	100	100	100	100	100
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19	Dokumen	19	19	19	100	19	57	300
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	12	12	12	100	12	36	300
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	7	Laporan	7	7	7	100	7	21	300
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	100	100	100	100	100	100	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	23	Orang/Bulan	23	23	23	100	23	69	300
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	12	12	12	100	12	36	300
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12	Dokumen	12	12	12	100	12		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023			TARGET PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
						TARGET RENJA PD TAHUN 2023	REALISASI RENJA PD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan Barang milik Daerah SKPD	12	Dokumen	12	12	12	100	12	36	300
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum	12	0							
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			12	0	0	0	0		
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum	100	Paket	100	100	100	100	100		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5	Paket	5	5	5	100	5	15	300
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	Paket	3					3	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3	Paket	3					3	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	3	Paket	3	3	3	100	3	9	300
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan pengadaan yang disediakan	3	Paket	3	3	3	100	3	9	300
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4	Dokumen	4	4	4	100	4	12	300
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	55	Laporan	55	55	55	100	55	165	300

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023			TARGET PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
						TARGET RENJA PD TAHUN 2023	REALISASI RENJA PD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	Laporan	24	24	24	100	24		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	12	12	100	12	36	300
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	12	12	12	100	12	36	300
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70	Unit	70	70	70	100	70		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	21	Unit	21	21	21	100	21	63	300
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	41	Unit	41	41	41	100	41	123	300
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	Unit	4	4	4	100	4	12	300
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4	Unit	4	4	4	100	4	12	300
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terselenggaranya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	%	100	100	100	100	100		
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	25	orang/bulan	25	25	25	100	25	75	300

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023			TARGET PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
						TARGET RENJA PD TAHUN 2023	REALISASI RENJA PD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	5	Paket	5	5	5	100	5	15	300
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti Medical check up DPRD	25	Orang	25	25	25	100	25	75	300
9	Layanan Administrasi DPRD	Terselenggaranya Layanan Administrasi DPRD	100	%	100	100	100	100	100		
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan fraksi DPRD	7	Laporan	7	7	7	100	7	21	300
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	75	Laporan	75	75	75	100	75	225	300
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	3	Paket	3	3	3	100	3	9	300
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100	%	100	100	100	100	100	100	
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD	5	Dokumen	5	5	5	100	5		
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program pembentukan Peraturan Daerah	1	Dokumen	1	1	1	100	1	3	300
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah	3	Dokumen	3	3	3	100	3	9	300

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023			TARGET PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
						TARGET RENJA PD TAHUN 2023	REALISASI RENJA PD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	1	Dokumen	1	1	1	100	1	3	300
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terselenggaranya Pembahasan Kebijakan Anggaran	10	Dokumen	10	10	10	100	10		
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2	Dokumen	2	2	2	100	2	6	300
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen hasil pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	Dokumen	2	2	2	100	2	6	300
	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2	Dokumen	2	2	2	100	2	6	300
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil Pembahasan APBD Perubahan	2	Dokumen	2	2	2	100	2	6	300
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2	Dokumen	2	2	2	100	2	6	300
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terselenggaranya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1	Dokumen	1	1	1	100	1		
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	2	Dokumen	1	1	1	100	1	3	150
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Meningkatnya Kapasitas DPRD	100	%	100	100	100	100	100		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023			TARGET PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
						TARGET RENJA PD TAHUN 2023	REALISASI RENJA PD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman Tugas DPRD	3	Dokumen	3	3	3	100	3	9	300
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen publikasi dan dokumentasi DPRD	1	Dokumen	1	1	1	100	1	3	300
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	3	Orang	3	3	3	100	3	9	300
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	Orang	7	7	7	100	7	21	300
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	<i>Terserapnya Aspirasi Masyarakat</i>	100	Dokumen	100	100	100	100	100		
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD	16	Laporan	16	16	16	100	16	48	300
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok - pokok pikiran DPRD yang disusun	1	Dokumen	1	1	1	100	1	3	300
	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	3	Dokumen	3	3	3	100	3	9	300
6	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Tugas Pimpinan DPRD	24	%	24	24	24	100	25		
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	24	Dokumen	24	24	24	100	24	72	300
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD							1		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara substantif dapat diuraikan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025 berdasarkan pokok - pokok pelayanan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan administrasi Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD menyelenggaraan administrasi Ketatausahaan atau Kesekretariatan DPRD dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewewenangan DPRD baik sebagai perencanaan penyusunan legislasi daerah, fungsi pengawasan penganggaran serta tugas-tugas dan fungsi DPRD lainnya. Wujud Penyelenggaraan Admnistrasi DPRD yakni membuat admnistrasi bagi lembaga DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas DPRD.

2. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD

Selain administrasi umum Sekretariat DPRD memfasilitasi perencanaan kebutuhan keuangan pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.

3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat DPRD, yang terdiri dari :

a. Rapat Alat kelengkapan

- ✓ Rapat Pimpinan
- ✓ Rapat Komisi
 - Rapat Komisi A
 - Rapat Komisi B
 - Rapat Komisi C
 - Rapat Gabungan Komisi
- ✓ Rapat Badan
 - Rapat Badan Anggaran
 - Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah
 - Rapat Badan Musyawarah
 - Rapat Badan Kehormatan

b. Rapat Fraksi

- Fraksi Partai Nasdem
- Fraksi Partai Golkar
- Fraksi Partai Perindo
- Fraksi PDI Perjuangan

- Fraksi Partai Hanura
 - Fraksi Gabungan Persatuan Bangsa
 - Fraksi Gabungan Demokrat Sejahtera
- c. Rapat Paripurna
- Rapat Paripurna Internal
 - Rapat Paripurna
 - Rapat Paripurna Istimewa
 - Rapat Paripurna Khusus
4. Pengadaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Salah satu tugas Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi pengadaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD / alat-alat kelengkapan DPRD. Oleh karena itu dengan menyesuaikan kebutuhan DPRD dan kemampuan keuangan daerah, maka pada tahun 2025 disediakan 11 orang tenaga ahli yang terdiri dari :

- Tenaga Ahli Fraksi : 7 Orang.
- Tenaga Ahli DPRD : 3 Orang

Tenaga Ahli pada DPRD dalam pelaksanaan tugasnya tidak spesifik pada satu alat kelengkapan DPRD hal ini karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah sehingga tenaga ahli tersebut dioptimalisasikan pada semua alat kelengkapan DPRD yang ada artinya daerah sangat diuntungkan dengan adanya kondisi tersebut.

5. Pelayanan ketatausahaan Sekretariat DPRD

Wujud pelayanan ketatausahaan adalah berupa pengelolaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan umum lainnya.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Sekretariat DPRD dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Secara rinci, capaian IKU Sekretariat DPRD disajikan pada Tabel di bawah ini :

Tabel. 2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Rote Ndao

No	Indikator Tujuan/Sasaran	SPM/ Stand ar Nasio nal	IKK	Target Renstra Sekretariat DPRD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase fasilitasi kegiatan DPRD			100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Ranperda menjadi Perda			100	100	100	100	225	100	100	100	
3	Persentase Keputusan DPRD yang dihasilkan			100	100	100	100	180	180	100	100	
4	Persentase Ranperda Inisiatif DPRD yang dihasilkan			100	100	100	100	0	0	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Mengacu pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rote Ndao yang merupakan implementasi mutatis muntandis Peratutan Pemerintah Nomor 12 Tentang Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, maka posisi Sekretariat DPRD sebagai sistem pendukung pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang DPRD yang wujud aplikasinya adalah memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.

Agar pelaksanaan fungsi fasilitasi kepada DPRD dapat berjalan dengan baik dan maksimal diperlukan Peningkatan kualitas penyelenggara atau aparatur pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao meliputi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur, peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta optimalisasi sistem pelayanan dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku. Implementasi peningkatan kualitas pelayanan tersebut meliputi:

- a) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur melalui pendidikan formal, diklat fungsional dan struktural serta bimbingan teknis bagi aparatur sekretariat DPRD.

- b) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan serta penyediaan layanan teknologi informasi berbasis jaringan.
- c) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD seperti penyediaan sarana mobilitas serta penyediaan peralatan kerja yang dibutuhkan.
- d) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
- e) Peningkatan Kualitas perencanaan dalam penyusunan/ perancangan peraturan daerah, Peraturan DPRD dan Keputusan DPRD melalui arahan dan petunjuk pimpinan.

IDENTIFIKASI FAKTOR STRATEGI

Untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan kajian dan analisis yang presisi untuk menentukan strategi, sasaran, program dan kegiatan tahunan ke depan dalam bentuk Rencana Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao, dengan metode atau alat analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threaty) yaitu dengan menganalisis faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman. Dari faktor-faktor tersebut dibagi menjadi 2 Faktor yaitu :

A. Identifikasi Faktor Strategi Eksternal

1. Peluang (Opportunity)

Peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain :

- 1) Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi terhadap pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD
- 2) Kesempatan yang luas bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan maupun pelatihan formal maupun non formal.
- 3) Peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan legislasi daerah serta pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dibidang pengawasan dan anggaran
- 4) Perkembangan infrastruktur wilayah

2. Tantangan/ancaman (Threaty)

Tantangan yang perlu diantisipasi, antara lain :

- 1) Perubahan peraturan perundangan, pedoman dan kebijakan Munculnya yang berdampak penyusunan produk hukum daerah

- 2) Kebijakan daerah yang mendadak akibat kebutuhan yang mendesak sehingga menyebabkan perencanaan legislasi serta tugas dan fungsi DPRD lainnya tidak konsisten
- 3) Terdapatnya ketidakselarasan antara peraturan perundangan tentang legislasi daerah serta tugas dan fungsi DPRD lainnya.

B. Identifikasi Faktor Strategi Internal

1. Kekuatan (Strength)) yang bisa digunakan, antara lain :

- 1) Keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao sebagai sistem pendukung DPRD Kabupaten Rote Ndao
- 2) Adanya legitimasi hukum terkait pelaksanaan fasilitasi DPRD yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP 21 Tahun 2007 Perubahan Kedua Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.
- 5) Peraturan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rote Ndao.
- 6) Ketersediaan Personalia atau aparatur yang memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan.
- 7) Dokumen-dokumen pendukung yang disiapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao sebagai acuan dalam perencanaan penyusunan legislasi daerah dan tugas-tugas serta fungsi DPRD lainnya yang sudah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangan.
- 8) Sarana-prasarana pendukung perencanaan legislasi daerah dan pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi DPRD.
- 9) Adanya tenaga kontrak yang cukup untuk membantu kelancaran tugas Sekretariat DPRD.

2. Kendala/kelemahan (Weakness)

Kelemahan dalam Sekretariat DPRD yang perlu diperhatikan, antara lain :

- 1) Kuantitas sumber daya manusia belum mencukupi.

- 2) Kurangnya unsur pelaksana atau staf PNS pada masing-masing bagian.
- 3) Kurangnya kemampuan manajerial dan teknis dari unsur pelaksana tugas dalam Sekretariat DPRD.
- 4) Tenaga kontrak yang ada tidak menunjukkan kinerja yang maksimal.

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman diperoleh strategi alternatif sebagai berikut :

1. Strategi memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
2. Strategi menanggulangi kendala/kelemahan dengan memanfaatkan peluang;
3. Strategi memakai kekuatan untuk menghadapi tantangan/ancaman;
4. Strategi memperkecil kendala/kelemahan dan menghadapi tantangan/ancaman.

Dari hasil analisis sederhana, dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dengan faktor internal kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah dengan mengoptimalkan potensi yang ada, namun pengaruh kelemahan maupun ancaman perlu di perhatikan.

Isu-isu strategis berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga sistem Pendukung DPRD, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam satu tahun ke depan adalah :

1. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD diperlukan sistem administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mengikuti perkembangan teknologi, dengan mengikuti perkembangan teknologi diharapkan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih efisien dan efektif.

2. Pemantapan Peran Sekretariat DPRD sebagai Fasilitator Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Peran Sekretariat DPRD dalam Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD perlu ditingkatkan, Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao

diharapkan menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholders baik di tingkat daerah pusat maupun di tingkat provinsi termasuk swasta.

3. Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao sebagai Lembaga yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

Amanat Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam rangka Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang berbasis kinerja perlu disusun secara transparan dan berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPRD serta dilaksanakan secara transparan dan diawasi oleh DPRD, sedangkan pejabat pelaksana bertanggung jawab penuh atas keberhasilan dan kebijakan tersebut. Dengan demikian, perencanaan dan pengelolaan keuangan akan lebih berorientasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal.

4. Mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli atau kelompok pakar yang diperlukan DPRD

Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi DPRD dalam melahirkan kebijakan-kebijakan daerah yang aspiratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka alat kelengkapan DPRD perlu didukung oleh tenaga ahli/kelompok pakar yang profesional, yang pembentukannya difasilitasi oleh Sekretariat DPRD atas usul alat Kelengkapan DPRD.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Kerja (Renja) pada tahun 2025 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2025 yang berisikan program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kabupaten Rote Ndao. Pada Rencana Kerja Tahun 2025 akan disinkronisasi dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Rote Ndao sehingga menjadi rumusan program dan kegiatan yang definitive untuk dijadikan Rencana Kerja Tahun 2025.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				27.328.582.321					27.601.867.000
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	16.295.161.794			Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	16.458.113.000
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19	9.760.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19	9.760.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12	5.626.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12	5.626.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	7	4.134.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	7	4.134.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1.652.455.641	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1.652.455.641
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	23	1.547.275.641	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	23	1.547.275.641
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	105.180.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	105.180.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12	14.625.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12	14.625.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah dokumen pengamanan Barang milik Daerah SKPD	12	14.625.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah dokumen pengamanan Barang milik Daerah SKPD	12	14.625.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum	12	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum	12	-
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum	100	225.103.269	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum	100	417.044.432
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5	10.015.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5	10.145.975
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	61.810.077
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3	150.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	3	102.561.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	3	82.561.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	14.827.269	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	14.827.380
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4	16.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4	16.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Kupang, Jakarta)	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	55	81.200.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Kupang, Jakarta)	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	55	81.200.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	207.545.714	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	207.545.714
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	17.281.714	Jumla Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	17.281.714

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	190.264.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	190.264.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70	421.415.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70	421.415.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	21	391.765.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	21	391.765.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	41	12.690.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	41	12.690.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	10.370.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	10.370.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4	6.590.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4	6.590.000
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Terselenggaranya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	11.700.888.900	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Terselenggaranya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	11.700.888.900
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	25	10.564.254.525	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	25	10.564.254.525
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah Paket penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	5	695.753.375	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah Paket penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	5	695.753.375
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	(Kupang)	Jumlah orang yang mengikuti Medical check up DPRD	25	440.881.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	(Kupang)	Jumlah orang yang mengikuti Medical check up DPRD	25	440.881.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
9	Layanan Administrasi DPRD	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Terselenggaranya Layanan Administrasi DPRD	100	2.063.368.270	Layanan Administrasi DPRD	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Terselenggaranya Layanan Administrasi DPRD	100	2.034.378.313
	Fasilitasi Fraksi DPRD	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah Laporan fraksi DPRD	7	90.012.120	Fasilitasi Fraksi DPRD	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah Laporan fraksi DPRD	7	61.022.163
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	75	293.356.150	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	75	293.356.150
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	3	1.680.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	3	1.680.000.000
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	(Kab. Rote Ndao , Provinsi NTT)	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100	11.033.420.527	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	(Kab. Rote Ndao , Provinsi NTT)	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100	11.143.754.000
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD	5	4.325.335.400	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD	5	4.379.816.500
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program pembentukan Peraturan Daerah	1	228.343.900	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program pembentukan Peraturan Daerah	1	275.000.000
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	(Kupang, Kab. Rote Ndao)	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah	3	4.079.816.500	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	(Kupang, Kab. Rote Ndao)	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah	3	4.079.816.500
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	1	17.175.000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	1	25.000.000
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT)	Terselenggaranya Pembahasan Kebijakan Anggaran	10	266.500.000	Pembahasan Kebijakan Anggaran	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT)	Terselenggaranya Pembahasan Kebijakan Anggaran	10	286.530.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
	Pembahasan KUA dan PPAS	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2	14.985.000	Pembahasan KUA dan PPAS	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2	25.000.000
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah Dokumen hasil pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	14.985.000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah Dokumen hasil pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	25.000.000
	Pembahasan APBD	(Kupang, Kab. Rote Ndao)	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2	91.265.000	Pembahasan APBD	(Kupang, Kab. Rote Ndao)	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2	91.265.000
	Pembahasan APBD Perubahan	(Kupang, Kab. Rote Ndao)	Jumlah dokumen hasil Pembahasan APBD Perubahan	2	54.000.000	Pembahasan APBD Perubahan	(Kupang, Kab. Rote Ndao)	Jumlah dokumen hasil Pembahasan APBD Perubahan	2	54.000.000
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	(Kupang, Kab. Rote Ndao)	Jumlah dokumen hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2	91.265.000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	(Kupang, Kab. Rote Ndao)	Jumlah dokumen hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2	91.265.000
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	(Kabupaten Rote Ndao)	Terselenggaranya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1	50.725.200	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	(Kabupaten Rote Ndao)	Terselenggaranya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1	75.000.000
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	(Kabupaten Rote Ndao)	Jumlah Rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	2	50.725.200	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	(Kabupaten Rote Ndao)	Jumlah Rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	2	75.000.000
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	(Luar Daerah, Kab. Rote Ndao,)	Meningkatnya Kapasitas DPRD	100	1.253.810.927	Peningkatan Kapasitas DPRD	(Luar Daerah, Kab. Rote Ndao,)	Meningkatnya Kapasitas DPRD	100	1.327.707.400
	Pendalaman Tugas DPRD	(Luar Daerah)	Jumlah dokumen hasil pendalaman Tugas DPRD	3	927.789.347	Pendalaman Tugas DPRD	(Luar Daerah)	Jumlah dokumen hasil pendalaman Tugas DPRD	3	1.001.685.820
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	(Kabupaten Rote Ndao)	Jumlah Dokumen publikasi dan dokumentasi DPRD	1	26.021.580	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	(Kabupaten Rote Ndao)	Jumlah Dokumen publikasi dan dokumentasi DPRD	1	26.021.580

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	(Kabupaten Rote Ndao)	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	3	90.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	(Kabupaten Rote Ndao)	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	3	90.000.000
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	(Kabupaten Rote Ndao)	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	210.000.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	(Kabupaten Rote Ndao)	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	210.000.000
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	(Kab. Rote Ndao)	<i>Terserapnya Aspirasi Masyarakat</i>	100	3.049.560.000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	(Kab. Rote Ndao)	<i>Terserapnya Aspirasi Masyarakat</i>	100	3.062.211.100
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	(Kabupaten Rote Ndao)	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD	16	191.400.000	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	(Kabupaten Rote Ndao)	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD	16	199.051.100
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	(Kabupaten Rote Ndao)	Jumlah dokumen pokok - pokok pikiran DPRD yang disusun	1	11.790.000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	(Kabupaten Rote Ndao)	Jumlah dokumen pokok - pokok pikiran DPRD yang disusun	1	16.790.000
	Pelaksanaan Reses	(Kabupaten Rote Ndao)	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	3	2.846.370.000	Pelaksanaan Reses	(Kabupaten Rote Ndao)	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	3	2.846.370.000
6	Fasilitasi Tugas DPRD	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Terlaksananya Tugas Pimpinan DPRD	25	2.087.489.000	Fasilitasi Tugas DPRD	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Terlaksananya Tugas Pimpinan DPRD	24	2.012.489.000
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	(Kupang)	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	24	2.012.489.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	(Kupang)	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	24	2.012.489.000
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	(Kabupaten Rote Ndao)	Jumlah Laporan Kinerja DPRD	1	75.000.000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	(Kabupaten Rote Ndao)	Jumlah Laporan Kinerja DPRD		-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Seperti telah diketahui bahwa pemerintah pusat telah menyusun RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Tahun 2024 dengan Tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 7 (Tujuh) Prioritas Nasional antara lain RKP 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional, yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif pada Pimpinan dan Anggota DPRD maka Sekretariat DPRD mempunyai kewajiban untuk:

1. Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi melalui sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan Sumber Daya Aparatur, sarana dan prasarana.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal semua kebijakan dan regulasi daerah.
3. Meningkatkan kualitas pengawasan agar lebih terstruktur, dengan azas demokrasi, transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi umum sesuai tata kelola pemerintah yang baik, bersih, transparan dan akuntabel
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Berkualitas Melalui Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitasi tugas, fungsi dan kewenangan DPRD untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan fungsi sebagai lembaga sistem pendukung
5. Meningkatkan peranan dan keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan
6. Meningkatkan ketersediaan data, dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan penyusunan Legislasi daerah dan pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD
7. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2025 adalah :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi umum sesuai tata kelola pemerintah yang baik, bersih, transparan dan akuntabel
2. Tersediannya kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Berkualitas
3. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi tugas, fungsi dan kewenangan DPRD,
4. Tersediannya kebijakan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatnya peran dan fungsi sekretariat DPRD sebagai lembaga pendukung
6. Tersediannya produk perencanaan yang akurat dan bermutu
7. Tersediannya data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses penyusunan legislasi daerah khususnya dalam penyusunan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD.
8. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah rangkaian kegiatan utama yang diperlukan berdasarkan kebijakan yang telah diputuskan dan dipilih yang dilengkapi dengan target dan sasaran yang jelas. Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih teknis dan operasional untuk masa satu tahun kedepan meliputi program, kegiatan, yang akan dilaksanakan.

Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Renstra Sekretariat DPRD dan RPJMD Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024. Untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 melaksanakan 2 Program, 14 kegiatan, dan 41 Sub Kegiatan yang dirumuskan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /

Kota terdiri dari 8 kegiatan dan 24 sub kegiatan yaitu :

- a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan tunjangan gaji ASN
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

3. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
 7. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terdiri Dari 4 sub kegiatan yaitu:
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 2. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
 3. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
 4. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya.
- g. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :
1. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
 2. Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut DPRD
 3. Pelaksanaan Medical Check UP DPRD
- h. Layanan Administrasi DPRD terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :
1. Fasilitasi fraksi DPRD
 2. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
 3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
- 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdiri dari 6 kegiatan dan 17 sub kegiatan yaitu :**
- a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:
1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 3. Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan

- b. Pembahasan Kebijakan Anggaran terdiri dari 5 sub Kegiatan yaitu:
 - 1. Pembahasan KUA dan PPAS
 - 2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - 3. Pembahasan APBD
 - 4. Pembahasan APBD Perubahan
 - 5. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri satu sub kegiatan yaitu: Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- d. Peningkatan Kapasitas DPRD terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
 - 1. Pendalaman Tugas DPRD
 - 2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - 3. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - 4. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :
 - 1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
 - 2. Penyusunan Pokok_ Pokok Pikiran DPRD
 - 3. Pelaksanaan Reses
- f. Fasilitasi Tugas DPRD terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas DPRD

Total kebutuhan dana yang diperlukan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2025 untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao sebesar **Rp.27.601.867.000,-** (Dua puluh tujuh miliar enam ratus satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao untuk Tahun 2025 melaksanakan 2 Program, 14 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan. Program dan kegiatan ini sudah mengalami pemetaan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pendanaan program dan kegiatan berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum) Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2025.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 sesuai Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Sekretariat DPRD

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	3		7	5		6	8		9	10
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					27.601.867.000				27.877.885.000
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERWUJUDNYA LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	100 %		16.458.113.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100	16.647.694.000
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain) (	19	Dokumen	9.760.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		19	10.173.400
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	12	Dokumen	5.626.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12	5.626.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	7	Laporan	4.134.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7	4.547.400
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	100	%	1.652.455.641	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100	1.734.680.393
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	23	Orang/Bulan	1.547.275.641	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		23	1.618.982.393
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	12	Dokumen	105.180.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12	115.698.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	12	Dokumen	14.625.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12	16.087.500
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan Barang milik Daerah SKPD	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	12	Dokumen	14.625.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12	16.087.500
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	12	0	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12	-

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	3		7	5		6	8		9	10
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	100	Paket	417.044.432	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100	500.088.380
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	5	Paket	10.145.975	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5	25.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	3	Paket	61.810.077	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3	125.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	3	Paket	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3	150.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	3	Paket	82.561.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3	82.561.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	3	Paket	14.827.380	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3	14.827.380
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	4	Dokumen	16.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4	21.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	(Kupang)	55	Laporan	81.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		55	81.200.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	24	Laporan	207.545.714	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		24	226.572.114
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	12	Laporan	17.281.714	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12	17.281.714
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	12	Laporan	190.264.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12	209.290.400

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	3		7	5		6	8		9	10
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	70	Unit	421.415.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		70	424.825.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	21	Unit	391.765.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		21	391.765.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	41	Unit	12.690.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		41	12.690.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	4	Unit	10.370.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4	10.370.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	4	Unit	6.590.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4	10.000.000
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terselenggaranya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	100	%	11.700.888.900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100	11.700.888.900
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	25	orang/bulan	10.564.254.525	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		25	10.564.254.525
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	5	Paket	695.753.375	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5	695.753.375
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti Medical check up DPRD	(Kupang)	25	Orang	440.881.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		25	440.881.000
9	Layanan Administrasi DPRD	Terselenggaranya Layanan Administrasi DPRD	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	100	%	2.034.378.313	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100	2.034.378.313
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan fraksi DPRD	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	7	Laporan	61.022.163	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7	61.022.163

Renja Awal Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao Tahun 2025

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	3		7	5		6	8		9	10
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	75	Laporan	293.356.150	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		75	293.356.150
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	3	Paket	1.680.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3	1.680.000.000
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	(Kab. Rote Ndao , Provinsi NTT)	100	%	11.143.754.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100	11.230.191.000
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	5	Dokumen	4.379.816.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5	4.379.816.500
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program pembentukan Peraturan Daerah	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1	Dokumen	275.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1	275.000.000
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah	(Kupang, Kab. Rote Ndao)	3	Dokumen	4.079.816.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3	4.079.816.500
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	1	Dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1	25.000.000
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terselenggaranya Pembahasan Kebijakan Anggaran	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT)	10	Dokumen	286.530.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10	286.530.000
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan KUA dan PPAS	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	2	Dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2	25.000.000
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen hasil pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	(Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	2	Dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2	25.000.000
	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	(Kupang, Kab. Rote Ndao)	2	Dokumen	91.265.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2	91.265.000

Renja Awal Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao Tahun 2025

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	3		7	5		6	8		9	10
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil Pembahasan APBD Perubahan	(Kupang, Kab. Rote Ndao)	2	Dokumen	54.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2	54.000.000
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	(Kupang, Kab. Rote Ndao)	2	Dokumen	91.265.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2	91.265.000
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terselenggaranya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	(Kabupaten Rote Ndao)	1	Dokumen	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1	75.000.000
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	(Kabupaten Rote Ndao)	2	Dokumen	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2	75.000.000
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Meningkatnya Kapasitas DPRD	(Luar Daerah, Kab. Rote Ndao,)	100	%	1.327.707.400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100	1.327.707.400
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman Tugas DPRD	(Luar Daerah)	3	Dokumen	1.001.685.820	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3	1.001.685.820
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen publikasi dan dokumentasi DPRD	(Kabupaten Rote Ndao)	1	Dokumen	26.021.580	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1	26.021.580
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	(Kabupaten Rote Ndao)	3	Orang	90.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3	90.000.000
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	(Kabupaten Rote Ndao)	7	Orang	210.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7	210.000.000
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	(Kab. Rote Ndao)	100	Dokumen	3.062.211.100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100	3.148.648.100
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD	(Kabupaten Rote Ndao)	16	Laporan	199.051.100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		16	199.051.100

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	3		7	5		6	8		9	10
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok - pokok pikiran DPRD yang disusun	(Kabupaten Rote Ndao)	1	Dokumen	16.790.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1	16.790.000
	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	(Kabupaten Rote Ndao)	3	Dokumen	2.846.370.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3	2.932.807.000
6	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Tugas Pimpinan DPRD	(Kupang)	24	%	2.012.489.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		24	2.012.489.000
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	(Kupang)	24	Dokumen	2.012.489.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		24	2.012.489.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD disusun sebagai instrumen untuk mendeskripsikan proses perencanaan program kegiatan dengan mengelola potensi, peluang, kendala dan hambatan yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan potensi peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari produk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 secara umum.

Demikian Rencana Kerja Awal Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 disusun untuk menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna mencapai visi dan misi Kabupaten Rote Ndao.

Baa, 21 Maret 2024

Sekretaris DPRD
Kabupaten Rote Ndao,



Benyamin Koamesah, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19670828 199903 1 008